

## IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Siska Indriyani Samosir

Email: [siska.indriyani.samosir@gmail.com](mailto:siska.indriyani.samosir@gmail.com)

Pembimbing : Abdul Sadad, S.sos.,M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau , Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru  
Pekanbaru 288293 Telp/Fax. 0761-63277

### *Abstract*

*Livable Housing Program is a program organized by the government of Kampar regency in order to realize decent housing for the poor. Then the government through the Department of Human Settlements and Spatial Kampar regency make policy regarding Livable Housing Program which is stipulated in Kampar Regent Number: 648 / ckTR-SET / 2015/937 Guidelines On Development Aid Livable house. But in the year 2012 to 2014 before the decree was issued, the program is still using the Handbook of Development Assistance Livable house. This study aims to determine Livable Housing Program Implementation in Kampar regency and to determine the factors inhibiting Livable Housing Program Implementation in Kampar regency.*

*In a theoretical model of implementation by George C. Edward in Widodo (2011: 96-110), there are four critical variables in the implementation of public policies or programs that establish linkages with each other to achieve the purpose of implementation of the policy, namely communication, resources, disposition, and structure bureaucracy.*

*The method used in this research is qualitative research. With the technique done of snowball sampling, the key informant in this study. In this study, the informant is the Head. Cipta Karya, Kasi. Housing and Resettlement, Local Community Organizations (OMS) and Recipient Livable Housing Program.*

*Based on the research and discussion that researchers do in the field, it was found that the Program Implementation Livable house in Kampar regency has not been implemented to the fullest. That's because various factors that hinder the implementation of this program is difficult implemented optimally.*

**Keywords: Implementation, Program, Home Livable**

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang begitu kompleks, hal ini dikarenakan ketidakmampuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi program utama disetiap pemerintahan. Layaknya menjadi fokus utama, pemerintah melakukan berbagai macam upaya dalam menekan angka kemiskinan yang ada. Intervensi melalui kebijakan dilakukan secara bervariasi, baik berupa bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, serta melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar menyebutkan dalam pasal 15, yaitu Program penanganan fakir miskin meliputi:

- a. Bantuan pangan,
- b. Bantuan kesehatan,
- c. Bantuan pendidikan,
- d. Bantuan perumahan,
- e. Bantuan peningkatan keterampilan, dan
- f. Bantuan modal usaha.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan 5 (lima) pilar Pembangunan Kabupaten Kampar, yaitu :

1. Peningkatan Akhlak dan Moral

2. Meningkatkan Ekonomi Rakyat
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
5. Meningkatkan infrakstruktur

Dengan tujuan akhir mengentaskan :

- a. Kemiskinan
- b. Pengangguran
- c. Rumah-Rumah Kumuh

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multi-sektor dengan beragam karakteristik, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Masyarakat miskin di Kabupaten Kampar pada tahun 2015 berjumlah 36421 Kepala Keluarga. (*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2015*)

Kemiskinan menimbulkan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapat rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standard lingkungan pemukiman yang responsive (sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses sumber daya kunci termasuk informasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan perumahan.

Rumah merupakan kebutuhan dasar selain pangan dan sandang yang masih belum sempat terpenuhi oleh seluruh masyarakat. Sebenarnya rumah tidak harus mewah untuk sekedar memenuhi standar rumah sehat dan layak huni. Untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga

tanpa memperhitungkan kelayakan dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidak berdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hampir sebagian rumah di desa tidak layak untuk di huni.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, Pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membuat kebijakan mengenai Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang di rancang khusus masyarakat kurang mampu yang disebut Program Rumah Layak huni yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Pada tahun 2012 hingga tahun 2015 sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati, program ini hanya menggunakan Buku Pedoman Untuk Kegiatan Rumah Layak Huni Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar.

Pembangunan Rumah Layak Huni adalah salah satu komponen kegiatan Pembangunan Swakelola, dan pembangunan perumahan ini khususnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni bila dilihat dari

aspek kesehatan kenyamanan dan keamanan penghuninya.

Tujuan dari program ini jelas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntakan rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Selain juga menghapus kawasan-kawasan miskin dan kumuh yang ada di beberapa Kecamatan. Program ini juga sebagai wujud pelaksanaan Program Kemiskinan kebodohan dan Infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di Kabupaten Kampar yang mana pemukiman penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni. Pembangunan Rumah Layak Huni ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan pedesaan. Tercapainya sarana dan tujuan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan sasaran dari Program Pembangunan Rumah Layak Huni ini adalah :

- a. Penerima manfaat memiliki lahan untuk kebutuhan pembangunan rumah.
- b. Penerima manfaat memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah.
- c. Penerima manfaat memiliki bukti atas kepemilikan rumah yang kurang layak bila dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya.

Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni tersebut perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis agar memenuhi persyaratan

rumah yang layak huni, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan optimal. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan Prosedur Operasional Baku (POB) pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni, untuk dipahami dan dilaksanakan. POB pembangunan Rumah Layak Huni ini dibuat untuk melengkapi atau memperjelas petunjuk teknis perencanaan infrastruktur

Walaupun Pemerintah Daerah telah memiliki Program Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya pada kualitas konstruksi yang kurang memperhatikan standar yang dipersyaratkan, seperti tidak adanya struktur rangka (kolom praktis, balok pengikat/sloof, balok keliling/ringbalk) sebagai penguat utama. Selain itu juga ditemukan luasan jendela/ventilasi dan lantai yang tidak memadai, termasuk bangunan pelengkap seperti tidak adanya air bersih, saluran pembuangan air kotor dan jamban (WC).

Menurut dinas terkait bantuan program rumah layak huni ini maksimal hanya 2 kali dalam setahun pembangunannya dalam 1 desa, namun kenyataannya banyak terjadi lebih dari 2 kali pembangunan dalam setahun dalam 1 desa atau melebihi jumlah maksimal. Selain itu tidak merata bantuan ini keseluruh desa yang ada. Bahkan ada desa yang warganya sama sekali tidak menerima bantuan program rumah layak huni ini.

Selain itu anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembangunan rumah layak huni ini

semakin meningkat atau bertambah jumlah nominalnya, namun tidak dibarengi oleh meningkatnya pula kualitas bangunan yang ada.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni dengan judul penelitian : **“Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar”**.

## **D. Konsep Teori**

### **1. Teori Implementasi**

Implementasi menurut **George C. Edward** dalam **Widodo (2011: 96-110)** menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, Sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu, Disposisi dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana, variable-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

#### **A. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka ini yang akan menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut.

## B. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementor tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial berbagai fasilitas (bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya harus memberikan pelayanan.

### Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis **Tanggilisan (2003: 9)**. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif.

Dampak dari disposisi banyak kebijaksanaan termasuk “zona ketakacuhan”. Kebijaksanaan ini mungkin dilaksanakan dengan tepat karena pelaksana-pelaksana tidak mempunyai perasaan yang kuat terhadap kebijaksanaan ini. Akan tetapi kebijaksanaan yang lain akan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijaksanaan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi para pelaksana.

## C. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dan setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operasional prosedur SOP*) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Ini tetap berlaku karena ketidakaktifan birokrasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang penulis dilakukan melalui wawancara kepada informan ditujukan untuk mencari-mencari informasi mengenai program rumah layak huni khususnya di Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang sudah berjalan selama 2012 hingga sekarang.

Dalam mengelola data yang diperoleh, penelitian menggunakan teknik yaitu dengan cara menganalisisnya berdasarkan data yang ada. Data yang diperoleh terdiri dari tinjauan lapangan dan dari hasil wawancara serta dari contoh kasus yang ada.

Kemudian dari hasil data tersebut akan diuraikan satu persatu dimensi beserta indikator yang penulis ajukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data yang terkumpulkan dari

tinjauan lapangan dan hasil wawancara serta contoh kasus yang ada akan penulis deskripsikan, sehingga diketahui bagaimana hasil analisis terhadap variabel tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam hal Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar.

### **A. Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten**

**George C.Edward** dalam **widodo (2011)** adalah tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh Legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Melalui penelitian ini penulis ingin menganalisa Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar. Bupati Kampar dalam mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor: 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Dalam Peraturan Bupati, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya dan masyarakat di pedesaan pada umumnya melalui pendekatan pemberdayaan

masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya perdesaan semakin bertumbuh dan berkembang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kabupaten Kampar.

#### **A. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

**Widodo (2011)** mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Dalam komunikasi Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka akses informasi. Penyebarluasan dimaksudkan agar masyarakat dan organisasi-organisasi terkait dapat mengetahui Program yang di rancang oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan organisasi terkait. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Dalam hal ini Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar maka penulis mendapatkan hasil wawancara dengan yang menjelaskan bahwa:

*“Tujuan dari program ini pun untuk mewujudkan salah satu visi dan misi dari Bupati Kampar yaitu zero rumah-rumah kumuh dan zero kemiskinan. Selain itu tujuan Pembagian tugas sesuai dengan tim yang sudah ditentukan dalam buku pedoman yang ada”.*  
**(Wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Bpk Helmy Syarif, ST, 5 September 2016)**

Berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu penerima bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Tapung

*“Tidak ada pemberitahuan pasti dari awal pembangunan bagaimana rumah ini dibangun, seperti bagaimana tipe rumah dan tidak ada kejelasan anggaran. Hanya diberitahu saya akan mendapat bantuan Program Rumah Layak Huni. Setelah rumah selesai dibangun lalu pihak desa menyerahkan kunci”.***(Wawancara dengan salah satu penerima bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Salo, Ibu Saminur, 2014, 7 September 2016)**

Dari hasil wawancara dengan beberapa informen diatas peneliti menganalisa komunikasi yang ada di dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar kurang berjalan baik. Karena masih tidak terbukanya proses pembangunan rumah layak huni. Seharusnya komunikasi menjadi hal utama dalam pengimplementasian

suatu program agar tidak terjadi kesalah pahaman antara implementor dan masyarakat penerima bantuan.

## **B. Sumberdaya**

**Edward** dalam **Widodo (2011)** mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Sumber daya adalah faktor penting untuk Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten

Kampar. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas, menjadi dokumen saja.

Sumber daya disini berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan implementor kebijakan. Ketersedian jumlah pelaksana yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena pelaksana yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah pelaksana yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, pelaksana harus mempunyai keterampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesional dan kompetensi dalam bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Berikut ini penulis mendapatkan hasil wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan Program tersebut diperlukan sumberdaya yang memadai, baik dari sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana”.*  
**(Wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Bpk Helmy Syarif, ST, 5 September 2016)**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kasi. Perumahan Dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar mengenai sumber daya dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Dalam Program Rumah Layak Huni kami menyerahkan tahap pembangunannya kepada OMS disetiap desa. Kami hanya mengawasi dalam tahap pembangunannya, karena program ini adalah program swakelola masyarakat yang artinya adalah masyarakat desa masing-masing bahkan mereka sampai bergotong-royong untuk menyelesaikan pembangunan rumah itu.*  
**(Wawancara dengan Kasi. Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Bpk. Zulkifli, 6 September 2016)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informen diatas penulis menganalisa bahwa sumber daya manusia dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar harus memiliki keahlian khusus dalam segi pembangunan terlebih tukang



bangunan yang harus memahami tata cara pembangunan yang sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB).

## 2. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sementara itu dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar ada anggaran khusus yang dikeluarkan dalam tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah Rp.45.000.000,-/unit, sedangkan pada tahun 2015 hingga sekarang adalah Rp.60.000.000,-/unit. Anggaran didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehubungan dengan itu berikut hasil wawancara dengan Bpk. Kabid Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa :

*“Selama dalam pembangunan program ini dari tahun 2012 hingga tahun 2015, kami tidak terlalu mengalami kendala dari segi anggaran dan sumberdaya. Tapi pada tahun ini mengalami kendala karena terjadi pengurangan APBD dari pemerintah pusat. Kemudian dari segi sumberdaya nya tentu tidak ada masalah, karena yang membangun dan bahan-bahan bangunan didapat dari desa masing-masing”.* (Wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Bpk

*Helmy Syarif, ST, 5 September 2016)*

Selain melakukan wawancara dengan Bpk. Bendahara OMS salah satu desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu penerima bantuan yang sependapat yang memberi tanggapan tentang anggaran sebagai berikut:

*“Pembangunan banyak menggunakan material dari rumah kami sebelum pembangunan rumah ini karena anggaran yang minim.* (Wawancara dengan penerima bantuan Program Rumah Layak Huni salah satu desa di Kecamatan Kampar Utara, Ibu Mail, 2014, 07 September 2016)

*“Rumah ini dibangun dengan biaya kurang lebih Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah). Itupun biaya pemasangan meteran listrik dibiayai dengan kami sendiri. Sementara tukang bangunan memang sudah disediakan pihak desa dengan gaji dipotong dari biaya yang ada tersebut.* (Wawancara dengan penerima bantuan Program Rumah Layak Huni salah satu desa di Kecamatan Tapung, Ibu Teti, 2015, 19 September 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa anggaran menjadi kendala dalam program ini. Karena penerima masih mengeluarkan biaya tambahan. Seharusnya penerima tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk apapun.

## 3. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu

faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Berikut ini penulis mendapatkan hasil wawancara dengan Kabid.Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa:

*“Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni ini fasilitas yang dibutuhkan adalah bahan material bangunan, alat-alat bangunan dan transportasi dan jalan tentunya”.***(Wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Bpk Helmy Syarif, ST, 5 September 2016)**

Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua OMS salah satu desa di Kecamatan Tapung mengenai informasi dan kewenangan, sebagai berikut:

*“Informasi yang kami terima sudah jelas, lagipula kami sudah memegang buku pedoman pembangunan rumah layak huni”.***(Wawancara Dengan salah satu Ketua OMS desa di Kecamatan Kampar Utara, Bpk. Hasan Santoso, 18 September 2016)**

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informen diatas peneliti menganalisa bahwa penyampaian informasi bisa diterima dengan baik oleh OMS yang ada di setiap desa, hal itu dikarena dinas terkait sudah memberikan sosialisasi serta memberikan buku pedoman pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Kampar sebelum program ini dilaksanakan.

### **C. Disposisi**

Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk didalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan.

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka penulis mendapatkan hasil wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa :

*“Dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Kami bertugas memantau pelaksanaan fisik dan melakukan pengawasan”.***(Wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Bpk Helmy Syarif, ST, 5 September 2016)**

#### **D. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi yang mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operation Prosedur (SOP). Sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kebijakan yang berbentuk program harus mempunyai prosedur dan standar operasional agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa:

*“Selama ini kami sudah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam pembangunan rumah itu. Tidak ada yang menggunakan tugas dan wewenang untuk kepentingan pribadi karena ini salah satu program utama dari Bupati Kampar. Setiap Tim melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kami, selaku dinas sebagai pengawas pelaksanaan program ini.” (Wawancara dengan Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta*

*Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Bpk Helmy Syarif, ST 5 September 2016)*

#### **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar**

Dari pembahasan sebelumnya, berdasarkan proses analisis data bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar juga didukung dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang dianggap memahami permasalahan, maka peneliti akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

##### **1. Minimnya Anggaran**

Minimnya anggaran dalam Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar membuat program ini kurang maksimal. Hal ini didukung melalui hasil wawancara dengan Bendahara OMS dari salah satu desa yang mendapatkan bantuan Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar.

*“Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar adalah*

anggaran yang terlalu minim. Dengan anggaran segitu untuk membangun rumah rasanya sangat sulit. Kami sebagai tim pelaksana di desa harus pandai mengelola keuangan. Karena segala bentuk hal pembayaran di dapat dari anggaran yang ditetapkan seperti pembayaran tukang bangunan, gaji OMS dan lain-lain". (Wawancara dengan Bendahara OMS salah satu desa di Kecamatan Tapung, bpk. Edi Wartoyo, 19 September 2016) bpk. Edi Wartoyo, 19/09/16.

### 3. Ketidaktepatan Waktu

Dalam melaksanakan pembangunan Program Rumah Layak telah ditetapkan batas waktu untuk pembangunan program rumah layak diwajibkan menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan dalam jangka waktu maksimal 90 hari atau bulan kalender.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi. Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

*"Dalam pembangunan Program Rumah Layak Huni kendala dalam pembangunan rumah itu cuaca. Jika turun hujan diberhentikan sementara waktu, kendala lainnya untuk jalan yang kurang bagus karena hujan, material sulit untuk didapat. Biasanya di daerah yang masih terpencil". (Wawancara dengan Kasi. Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Bpk. Zulkifli 6 September 2016)*

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bpk. Hasan

Santoso selaku ketua OMS salah satu desa di Kecamatan Kampar Utara, mengatakan :

*"cuaca dengan curah hujan yang tinggi menjadi kendala, pembangunan terhambat dan tidak jarang pembangunan di berhentikan sementara". (Wawancara dengan ketua OMS salah satu desa di Kecamatan Kampar Utara, Bpk. Hasan Santoso 19 September 2016)*

### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Jadi Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dalam Implementas Program Rumah Layak Huni ini adalah material bangunan, alat-alat bangunan, dan transportasi. Sedangkan jalan, tanah yang akan di bangun rumah adalah prasarananya. Kurang memadainya

sarana dan prasarana menjadi penghambat Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar. Hal ini didukung melalui hasil wawancara dengan Kasi. Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kampar yang mengataka :

*“untuk melaksanakan program ini tidak semua desa bisa mendapatkan bahan-bahan material bangunan dengan mudah serta jalan yang tidak memadai juga mempengaruhi sulitnya masyarakat. Semakin tidak memadai jalan yang ada, biaya transportasi meningkat, oleh sebab itu semakin mahal pula harga bahan-bahan material yang dibutuhkan, (Wawancara dengan Kasi. Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Bpk. Zulkifli 06/09/16)*

Dari wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa sarana dan prasarana masih belum memadai dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni ini. Kabupaten Kampar yang memiliki 21 kecamatan tidak semuanya memiliki jalan dan transportasi yang memadai, itu menyebabkan sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan material bangunan atau bahan baku material bangunan.

## **PENUTUP**

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan

kesimpulan dan saran-saran tersebut sebagai berikut:

## **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan kajian analisa berdasar temuan-temuan dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala dalam implementasinya dan masih harus diperbaiki. Dalam pelaksanaan program rumah layak huni masih terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan rumah layak huni yaitu tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB). Selain itu dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar masih tidak terbuka tentang hal-hal dalam proses pembangunannya antara Organisasi Masyarakat (OMS) dengan masyarakat penerima bantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat berupa keterlibatan/partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dalam rumah layak huni di Kabupaten Kampar masih sangat rendah.

2. Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat yaitu pertama minimnya anggaran. Dengan minimnya anggaran, proses pembangunan rumah layak huni tidak berjalan dengan yang ada dalam Prosedur Operasional Baku (POB). Kedua, kurang efektifnya penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) dalam pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu faktor penghambat Implementasi Program

Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar, POB yang ada tidak sesuai dengan kelayakan pembangunan rumah yang ada di setiap daerah. Dengan kata lain setiap daerah tidak bisa menggunakan POB yang sama karena setiap daerah di Kabupaten Kampar memiliki letak geografis yang berbeda. Ketiga adalah ketidaktepatan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dan pencairan dana terjadi di akhir tahun menjadikan program ini terhambat dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan pembangunan harus dihentikan sementara. Selanjutnya faktor penghambat yang ke empat yaitu sarana dan prasarana pembangunan rumah layak huni. Tersedianya bahan material dan alat-alat bangunan menjadi faktor yang penting dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni. Untuk daerah terpencil masih sulit memperoleh bahan material bangunan dan alat-alat bangunan dikarenakan transportasi yang tidak memadai serta fasilitas jalan yang tidak memadai.

## **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian dalam Implementasi Program Rumah Layak di Kabupaten Kampar, maka penulis akan memberikan sebuah masukan untuk mengevaluasi dari hasil pelaksanaan dalam sebuah saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya meninjau kembali Prosedur Operasional Baku pembangunan rumah layak huni di kabupaten Kampar agar pembangunan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan tujuan awal program tersebut. Pemerintah juga menyesuaikan POB yang ada dengan kondisi geografis setiap desa yang ada di Kabupaten

Kampar, Karena tidak semua desa bisa menggunakan POB yang ada untuk membangun rumah layak huni. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi sehingga Program Rumah Layak Huni dapat berjalan seperti apa yang diinginkan. Untuk Organisasi Masyarakat Setempat di setiap desa yang ada di Kabupaten Kampar wajib memberi pemahaman kepada masyarakat penerima tentang Program Rumah Layak Huni agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

2. Dikarenakan faktor penghambat ialah minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah, maka anggaran perlu di tingkatkan lagi agar rumah terealisasi dengan baik. Selanjutnya Pemerintah harus meninjau kembali Prosedur Operasional Baku yang ada agar sesuai dengan setiap daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Dikarenakan ketidaktepatan waktu pembangunan karena hujan turun, untuk itu bisa ditanggulangi dengan mempercepat proses pembangunan rumah layak huni. Dalam pengadaan bahan material dan alat-alat bangunan pemerintah bisa membantu dalam pengadaannya. Agar tersalur dengan cepat sehingga tidak menghambat proses pembangunan rumah layak huni.

- 3.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Charles O. Jones. *Pengantar Kebijakan Public Rajawali* : Jakarta.
- Islami, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta. Sinar Grafika

- Muhammad Afrizal, Wirawan 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Mubyarto, 2001. *Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Nanga, M. 2006. *Dampak Transfer Fiscal Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. Disertai Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya  
----- . 2007. *Public policy*. Surabaya : Pmn
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia  
----- . 2006. *Kebijakan Publik untuk negara berkembang*. PT. Gramedia  
----- . 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Teori dan Praktek. AlafRiau dan Prodi Ilmu Administrasi Negara (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau : Pekanbaru*.
- Sumaryadi, Nyoman. I 20 05. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Tachjan 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD
- Tangkilisan, Hessel. Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta. (YPAPI) Lukman Offset
- Tangkilisan, 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo
- World Bank Institute. 2002. *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan Edisi Terjemahan*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Dokumen:**
1. Peraturan Bupati No 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Kampar Tahun 2015
  2. Buku Pedoman Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Kampar Tahun 2014
  3. Prosedur Operasional Baku Pembangunan Rumah Layak Huni